

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, lima literatur utama yang menjadi acuan untuk penelitian ini, di antaranya adalah;

Kajian literatur pertama yang berjudul *“Dampak Sanksi Nuklir Iran terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Iran”* oleh Ladies Lathifah tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan kemampuan Iran dalam mengelola uranium, dan Amerika Serikat yang memastikan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran berdampak signifikan pada program pengayaan uraniumnya. Meskipun program nuklir Iran ini diawasi oleh IAEA dan Iran sudah menandatangani NPT, tidak membuat Iran terhindar dari sanksi dan tekanan dari Amerika Serikat. Penelitian tersebut menggunakan konsep sanksi internasional untuk menjelaskan bahwa Iran akan menggunakan keringanan sanksi dari JCPOA untuk membangkitkan kembali ekonominya, yang menyebabkan mundurnya Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut dan secara resmi menjatukan embargo minyak terhadap Iran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan teknik analisis data berupa teknik kualitatif. Studi kajian pada penelitian ini merujuk pada aspek keamanan internasional karena proliferasi nuklir Iran ini dianggap akan mengancam stabilitas keamanan regional dan internasional.

Akan tetapi, terdapat perbedaan pada penelitian tersebut di mana sanksi yang dipaparkan oleh penulis tersebut bukan merupakan mekanisme paradoksal sanksi. Peneliti tersebut juga meneliti program nuklir Iran yang berdampak pada

entitas perusahaan asing dari Tiongkok dan Rusia karena diketahui mendukung penuh pengembangan nuklir di Iran yang mana hal ini tidak berkaitan dengan tema dalam skripsi ini.

Kajian literatur kedua yang berjudul *“Prospects for the Iran Nuclear Deal”* oleh Fraioli, dan Benjamin Rhode pada tahun 2020. Penelitian tersebut menjelaskan tentang Iran yang sedang memproduksi cukup uraniumnya dalam pantauan JCPOA. Literatur ini juga berisi laporan IAEA yang menyatakan bahwa Iran yang sebelumnya sudah mengurangi kelebihan *Low Enriched Uranium* (LEU) dari 10.000 kilogram (dalam bentuk uranium hexafluoride atau UF₆) lalu pada tahun 2020 persediaan Iran kembali meningkat dan berjumlah 5000 kilogram, yang mana jumlah ini sudah dalam tahap mampu mengembangkan senjata nuklir tiga kali lebih kuat. Penelitian ini menggunakan konsep kepatuhan yang menjadi acuan pada Iran terhadap batas nuklir yang ditetapkan oleh JCPOA, konsep ini berkaitan dengan Iran yang dinilai tidak lagi mematuhi JCPOA. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan konsentrasi isotop uraniumnya yang sudah sampai di tahap 60%, yang mana ini sudah berada diluar batas kesepakatan JCPOA.

Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitiannya. Studi kajian dalam penelitian tersebut merujuk pada aspek perkembangan internasional, karena sebagian besar temuan dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Amerika Serikat serta sanksi yang diberikan dan perkembangan program nuklir Iran. Adapun aspek perbedaan dari penelitian tersebut yang tidak dibahas dalam skripsi ini, di mana penelitian tersebut membahas mengenai Amerika Serikat yang mengizinkan Iran

untuk mengimpor pasokan medis untuk memerangi pandemi *Covid-19* tanpa perlu menghindari sanksi dari Amerika Serikat.

Kajian literatur selanjutnya yang berjudul ***“The Evolution of US Policy towards Iran and the Iranian Nuclear Program”*** oleh Nivine Kazan pada tahun 2021. Literatur tersebut menjelaskan tentang Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya untuk mengetahui perkembangan hubungan Amerika Serikat terhadap Iran dan program nuklirnya. Amerika Serikat juga memberikan sanksi pada sektor minyak Iran, dan melarang bentuk perdagangan apapun yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi, serta akan memberikan sanksi kepada negara yang diketahui memiliki bisnis ekspor impor dengan Iran. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan neo-realis yang menjelaskan bahwa tujuan negara memiliki senjata nuklir adalah untuk masa depan perdamaian dunia.

Penelitian tersebut juga menggunakan analisis kualitatif dengan mengandalkan sumber sekunder yang menyatakan motif pemerintahan Obama yang berada di belakang upaya kesepakatan JCPOA, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Trump. Sehingga, studi kajian pada penelitian tersebut merujuk pada aspek kebijakan luar negeri sebagai tinjauan respon dari pengembangan nuklir Iran. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yang mengkaji tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era Barack Obama, yang mana hal itu tidak menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

Kajian literatur terakhir yang berjudul ***“Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”*** yang ditulis oleh Satwika Pramasatya dan Sigit Wiranto pada tahun 2019. Penelitian tersebut menganalisis tentang *cognitive consistency* pada pemikiran Donald Trump yang

berkaitan dengan pengunduran diri Amerika Serikat pada 8 Mei 2018 dan secara resmi memutuskan untuk menerapkan sanksi kepada Iran melalui hegemoninya. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat menganggap bahwa JCPOA tidak cukup efektif terhadap program nuklir di Iran dan memandang bahwa kesepakatan ini tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.

Penelitian tersebut menggunakan konsep dilema keamanan yang memiliki persepsi yang menyebabkan munculnya keharusan untuk bertindak kemudian diwujudkan melalui sebuah kebijakan. Hal ini lah yang mendorong Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data dari penelitian yang relevan. Sehingga studi kajian dalam penelitian ini merujuk pada aspek kebijakan luar negeri, yang menjelaskan alasan Amerika Serikat mengundurkan diri dari kesepakatan nuklir Iran. Adapun aspek perbedaan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini di mana penelitian ini bersifat idiosinkretik yang memandang keputusan Donald Trump berdasarkan aspek kognitif dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No.	Judul	Penulis	Bidang	Topik	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1.	Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan Amerika Serikat-Israel di Timur Tengah	(Kiki Mikail, 2018)	International Relations	Alasan keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).	Upaya Amerika Serikat menghalangi pengembangan nuklir Iran, terkait dengan kepentingan AS untuk melindungi Timur Tengah.	Membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat yang memilih untuk mengundurkan diri dari JCPOA.	Tidak membahas mengenai negara Timur Tengah selain Israel.

2.	The Collapse of Global Governance: When the US Leaves the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)	(Djuyandi et al., 2021)	International Regimes	Kebijakan pemerintahan Trump mengatasnamakan Amerika Serikat keluar dari JCPOA untuk menggagalkan pencapaian global governance.	Runtuhnya global governance ketika Amerika Serikat keluar dari JCPOA terlihat dari kuatnya kepentingan nasional Amerika Serikat sebagai negara adidaya.	Membahas mengenai Amerika Serikat yang dapat menarik diri secara sepihak jika tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya	Tidak membahas secara spesifik mengenai perekonomian Amerika Serikat, dan hanya dampak ekonomi yang terjadi di Iran.
3.	Iran and the West After the Nuclear Deal: High Hopes, Low Return	(Tabrizi, 2018)	International Security	Kebijakan yang akan dilakukan setelah perjanjian JCPOA dalam hal perkembangan ekonomi dan politik antara Iran dan Barat.	Negara Barat berpendapat bahwa pengecualian Iran dari ketentuan militer suatu negara mengakibatkan miskomunikasi antara kedua belah pihak, sehingga berdampak negatif.	Membahas mengenai masalah nuklir Iran yang dianggap sebagai faktor krusial bagi stabilitas hubungan internasional.	Tidak membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat.
4.	Getting Deterrence Right	(Talbot, 2020)	International Security	Kekuatan regional yang dipersenjatai dengan <i>Weapons of Mass Destruction</i> (WMD) dan kemampuan pengiriman jarak jauh yang menyertainya menjadi	Meningkatnya aspek deterrence dari suatu negara karena nuklir akan memungkinkan Amerika Serikat untuk mencegah atau mengintervensi	Membahas mengenai aspek deterrence suatu negara sejak awal mula perang dingin, dan kaitannya dengan intervensi dari negara-negara super power.	Tidak membahas mengenai aspek deterrence secara spesifik di Iran dan pengaruhnya di Timur Tengah.

				perhatian negara-negara dunia, terutama negara super power.			
5.	War by other means: Geoeconomics and Statecraft	(Blackwell & Harris, 2016)	International Political Economy	Geoekonomi dan sistem internasional .	Penggunaan instrumen ekonomi untuk kepentingan nasional, serta menghasilkan manfaat geopolitik dan dampak perekonomian negara lain.	Membahas mengenai penggunaan kekuatan geopolitik atau militer untuk tujuan ekonomi.	Tidak membahas mengenai keamanan militer dalam meningkatkan ekonomi.
6.	Institutions, Strategic Restraint, and the Persistence of American Postwar Order	(Ikenberry, 1998)	International Regimes	Tatanan kooperatif dunia dibangun berdasarkan kesepakatan negara-negara hegemonik yang memperoleh komitmen dari negara-negara sekunder.	Hegemoni suatu negara mempunyai peran yang tidak proporsional dalam menciptakan tatanan dunia pascaperang, dan memiliki kapasitas paling besar untuk melanggar komitmennya dan memanfaatkan posisinya untuk mendominasi atau meninggalkan negara yang lebih lemah dan sekunder.	Membahas mengenai hegemoni suatu negara yang dikaitkan dengan rezim internasional.	Tidak membahas mengenai dampak hegemoni suatu negara terhadap suatu kawasan regional.

7.	Race and the Manhattan Project: Representations of Nuclear Weapons and Post-Apocalyptic Worlds	(Williams, 2020)	International Development	Proyek Amerika Serikat yang pertama kali menciptakan bom atom pada masa Perang Dingin, yang mana ini menjadi cikal bakal terbentuknya nuklir.	Perang senjata nuklir akan membentuk suatu kompromi demokratis yang akan dilakukan oleh negara Amerika Serikat selama masa perang dingin.	Membahas mengenai seberapa besar dampak ledakkan nuklir pada tatanan hubungan internasional.	Tidak membahas mengenai proses uji coba pembentukan nuklir seperti yang terjadi Manhattan Project di Los Alamos, Amerika Serikat.
8.	Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian	(Rr & Yustinigrum, 2016)	International Security	Pengayaan dan uji coba senjata nuklir yang selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional karena dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia.	Upaya pelarangan uji coba nuklir dari PBB yang merupakan bagian dari traktat NPT yang sudah disepakati sejak tahun 1970.	Membahas mengenai diplomasi terkait masalah senjata nuklir yang akan teratasi dengan kerjasama dengan negara <i>superpower</i> dan dengan menggunakan forum PBB.	Tidak membahas mengenai proses pengayaan nuklir yang terjadi di Iran, dan hanya memfokuskan kepada uji coba nuklir di Korea Utara.
9.	Why States Follow the Rules: Toward a Positional Theory of Adherence to International Legal Regimes	(Arend & Kreps, 2006)	International Law	Kepatuhan yang mencerminkan tindakan suatu negara untuk mengikuti perjanjian atau aturan hukum internasional tertentu, dan partisipasi suatu negara dalam hukum internasional yang	Perilaku kepatuhan suatu negara belum tentu bersifat proposisi, perilaku kepatuhan dapat dipahami dengan posisi suatu negara dalam sistem global dan regional yang berkaitan	Membahas mengenai teori <i>hegemonic stability</i> yang menyatakan bahwa pembentukan, pemeliharaan, penegakkan, dan ketahanan suatu rezim berkaitan langsung dengan power suatu negara atau kekuatan dominan	Tidak membahas mengenai penjelasan yang cukup tentang kepemimpinan hegemonik.

				sebenarnya lebih kompleks.	dengan sifat rezim.		
10.	How Iran Will Cope with US Sanctions	(Holly Dages, 2018)	International Political Economy	Cara Iran menghadapi sanksi dari Amerika Serikat.	Iran yang optimis dapat keluar dari lingkaran sanksi karena adanya dukungan dari Uni Eropa dan mitra dagang Iran di Asia.	Kemampuan Iran untuk bertahan dari sanksi ekonomi dan beranggapan bahwa JCPOA tidak memberikan manfaat apapun untuk Iran.	Penelitian ini tidak membahas mengenai pengaruh aspek geoekonomi di Kawasan Timur Tenga.
11.	Advances in Geoeconomics	(J. Mark Munoz, 2017)	International Political Economy	Studi kasus: geoekonomi dan kesepakatan nuklir Iran.	Geoekonomi dalam perjanjian nuklir adalah komponen utama dari sudut pandang negara-negara barat	Membahas mengenai penjelasan terkait dampak geoekonomi yang akan terjadi dari adanya kesepakatan nuklir Iran.	Tidak membahas mengenai aspek kebijakan luar negeri yang mendukung hubungan antara faktor politik dan ekonomi di tingkat global.
12.	Understanding Competition Great Power Rivalry in a Changing International	(Mazarr, 2022)	International relations	Power Transition: A Special Variety of Rivalry	Sistem internasional yang memiliki karakteristik yang unik untuk mempengaruhi dinamika kompetisi antar negara, termasuk tingkat kepatuhan terhadap kelembagaan internasional	Membahas mengenai sistem kepatuhan suatu negara, terutama pada negara super power, dan cara negara super power seperti Amerika Serikat menemukan keuntungan strategis untuk negaranya.	Fokus mengenai Amerika Serikat yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengatur dan melaksanakan perencanaan untuk menghadapi krisis

							dan perang.
13.	Reinterpretasi Studi Keamanan dalam Ilmu Hubungan Internasional	(Martin, 2021)	International Security	Teori-teori keamanan dalam studi hubungan internasional, dan perbandingan antara 'schools' of security theory in Europe dan 'schools' of security theory in the US.	<i>National security</i> dihasilkan dari perspektif realisme yang membahas keamanan tradisional, dan perspektif neorealisme yang membahas keamanan non-tradisional atau konvensional.	Membahas mengenai ilmu keamanan sebagai salah satu bagian dari <i>offensive realism</i> dan <i>defensive realism</i> .	Tidak membahas mengenai <i>state centric</i> dalam paradigma neorealisme.
14.	Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara	(Hidayat, 2017)	International Security	Konsep keamanan dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.	Kebijakan atau kepentingan negara dalam dunia internasional biasanya merupakan faktor objektif yang menghalangi perdamaian.	Membahas mengenai kepentingan negara dalam hal keamanan didasarkan pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi objek keamanan dalam berbagai entitas seperti negara, organisasi internasional, komunitas politik, ekonomi, dan militer.	Tidak membahas mengenai Human Security dari pendekatan studi keamanan Copenhagen School.
15.	Institute for National Security	(Landau, 2017)	Foreign Policy	Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama	Elemen-elemen penting dalam	Membahas mengenai keseluruhan perilaku Iran	Tidak membahas mengenai sejauh

	Studies US Policy on Iran Unveiled: Getting Tough without Leaving the Nuclear Deal			dengan Timur Tengah untuk mengatasi kelemahan dalam perjanjian JCPOA, serta aspek lain dari perilaku Iran yang dianggap mengganggu stabilitas.	kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat yang berpotensi untuk melawan provokasi dan agresi regional Iran,	yang dipandang negatif oleh Amerika Serikat diluar program nuklir, dukungan terhadap teror, dan aspirasi regional yang mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah.	mana Eropa bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat.
16.	The Trump Peace Plan: Aiming Not to Make a Deal but to Make a Deal Possible	(Lewis Libby & Douglas J. Feith, 2020)	Diplomacy	Visi perdamaian Timur Tengah dan Amerika Serikat pada akhir Januari 2020.	Kerjasama strategis antara negara-negara Arab, Israel, dan Amerika Serikat tanpa mengacu pada perjanjian perdamaian Palestina, memerangi terorisme, dan menentang Iran.	Membahas mengenai Donald Trump yang memfasilitasi perlawanan terhadap ancaman Iran dan membuat kebijakan diplomatik.	Simpatisasi dengan Palestina dan perlindungan terhadap keamanan Israel di Timur Tengah.
17.	A Political Theory of Economic Statecraft	(Blanchard & Ripsman, 2008)	International Political Economy	Sanksi insentif ekonomi suatu negara untuk dapat mencapai tujuan politik.	Dampak politik dari sinyal ekonomi akan bergantung pada berbagai faktor politik internasional dan dalam negeri, seperti	Membahas mengenai keberhasilan ekonomi tata negara yang dinilai bergantung pada kerugian atau peluang politik, dan semakin besar kerugian atau manfaat ekonomi yang	Tidak membahas secara spesifik mengenai sanksi ekonomi berupa embargo.

					otonomi, kapasitas, dan legitimasi.	ditanggung oleh negara, akan semakin besar adanya kemungkinan kepatuhan suatu negara.	
18.	Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)	(Satwika Paramasetya & Sigit Wiranto, 2019)	Foreign Policy	Analisis <i>eclecticism</i> antara dilema keamanan dan <i>cognitive consistency</i> terhadap konsistensi pemikiran Donald Trump yang menghasilkan kebijakan yang dianggap irasional karena pengunduran diri Amerika Serikat dari JCPOA.	Amerika Serikat yang membawa kebijakan baru terkait isu nuklir Iran yang pada 8 Mei 2018 secara resmi menarik diri secara sepihak dari perjanjian nuklir dan memutuskan untuk menerapkan sanksi kepada Iran.	Membahas mengenai Donald Trump yang memandang kesepakatan nuklir Iran sebagai pendekatan yang buruk karena sekutunya masih merasakan kekhawatiran keamanan dan memandang bahwa kesepakatan ini tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sehingga Trump berupaya untuk menekan Iran dengan keluar dari kesepakatan nuklir Iran.	Penelitian ini bersifat idiosinkretik yang memandang keputusan Donald Trump berdasarkan aspek kognitif.
19.	The Effect of Economic Sanctions on Iran's Export	(Shirazi et al., 2016)	International Political Economy	Akibat pembatasan internasional dan penerapannya oleh organisasi internasional	Jika sanksi ekonomi Iran terus berlanjut, maka dampak negatif dari sanksi	Membahas mengenai efektivitas sanksi ekonomi yang diberikan terhadap ekspor Iran	Sanksi ekonomi Iran khususnya pada tahun 2011 sampai 2013

				yang sangat mempengaruhi ekspor Iran.	terhadap ekspor Iran akan bertahan lama, lebih lanjut, mata uang nasional Iran akan mengalami penurunan yang jauh lebih parah.		
20.	Dampak Sanksi Nuklir Iran terhadap Hubungan Amerika Serikat dan Iran	(Ladies Lathifah, 2020)	International Security	Program pengayaan uranium Iran dan Amerika Serikat yang memastikan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran berdampak signifikan.	Meskipun program nuklir Iran diawasi oleh IAEA dan Iran sudah menandatangani NPT, hal itu tidak membuat Iran terhindar dari sanksi dan tekanan Amerika Serikat.	Membahas mengenai perkembangan kemampuan Iran dalam mengelola uranium yang menjadikan Iran mendapat kecaman Amerika Serikat.	Dampak sanksi ekonomi Amerika Serikat pada entitas perusahaan asing dari Tiongkok dan Rusia karena dukungan terhadap program nuklir Iran.
21.	The Great Power Competition Volume 1: Regional Perspectives on Peace and Security	(Farhadi & Masys Editors, 2021)	Regionalism	Pemahaman mengenai kompetisi negara super power sebagai faktor keamanan internasional dengan membentuk peraturan, baik dalam aspek geopolitik, ekonomi, dan militer.	Iran pada masa pra-revolusi dan kaitannya dengan persaingan antar negara-negara super power di Timur Tengah.	Membahas mengenai dominasi negara-negara super power berkaitan dengan asal mula program nuklir Iran.	Amerika Serikat yang menggunakan wilayah Iran dalam peluncuran rudal dan senjata nuklir ke Uni Soviet.
22.	Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika	(Zainal Mustofa &	Foreign Policy	Situasi politik Iran mengalami perubahan,	Pola kebijakan ekonomi dan nuklir pada era Hassan	Membahas mengenai Iran pada era Rouhani yang	Penelitian ini cenderung membahas

	Serikat di Bawah Kepemimpinan Hassan Rouhani	Populika /, 2023)		yang mana sebelum era Rouhani, Iran memiliki hubungan yang kurang baik dengan Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan nuklir.	Rouhani yang menjelaskan babak baru hubungan Iran dan Amerika Serikat.	mencoba untuk menormalisasi hubungan di bidang nuklir dan ekonomi terhadap Amerika Serikat.	mengenai Obama yang melepaskan sikap <i>hard power</i> menuju <i>soft power</i> , yang mana ini berbanding terbalik dengan pada saat era Donald Trump.
23.	Hegemonic Disruption: The Asymmetric Challenge to US Leadership	(Newman, 2011)	International Law	Ideologi hegemoni Amerika Serikat yang berlawanan dengan aktor-aktor non-negara.	Aktor non-negara yang menolak hegemoni Amerika Serikat, baik secara ideologis maupun dalam kaitannya dengan kekuatan Amerika Serikat, dapat menjadi tantangan strategis yang signifikan.	Iran yang dianggap sebagai pemberontak regional bagi hegemonik Amerika Serikat.	Penelitian ini menggunakan teori realis tradisional mengenai persaingan negara <i>great power</i> atau persaingan hegemonik yang dalam hal ini Amerika Serikat sebagian besar kebijakannya berasal dari politik agama.
24.	The Limits of Hegemonic Stability Theory	(Snidal, 1985)	International Law	Pemahaman secara luas mengenai teori hegemonic stability dalam sistem internasional.	Aktor dalam sistem internasional yang lebih dominan dan memiliki power akan menghasilkan suatu	Membahas mengenai stabilitas hegemonik yang juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan	Penulis mengasumsikan teori ini mengabaikan dampak negosiasi dan adanya kerjasama

					aturan yang akan dipatuhi oleh semua aktor yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional .	ekonomi, sehingga dalam suatu rezim internasional memerlukan implikasi penuh dari adanya stabilitas hegemonik.	melalui tindakan kolektif.
25.	The Iran Nuclear Deal: The Iranian and US Domestic Factors that Put its Implementation at Risk	(Viaud, 2016)	International Regimes	Perjanjian JCPOA dalam menyelesaikan krisis keamanan internasional yang disebabkan oleh kegiatan nuklir Iran yang sudah dilakukan secara rahasia dan tidak teridentifikasi sejak tahun 2003.	JCPOA yang sudah disepakati oleh negara anggota DK PBB memastikan bahwa program nuklir Iran dikembangkan untuk tujuan sipil dan non-militer dengan meminta Iran menghentikan pengayaan uranium dan plutoniumnya, dan mengizinkan inspeksi dan pemeriksaan dari IAEA.	Kesepakatan JCPOA mempertahankan embargo senjata untuk mencegah penyebaran senjata ofensif dan transfer rudal balistik ke Iran. Sebagian besar kontraksi perekonomian disebabkan oleh penurunan tajam produksi minyak dan produktivitas non-minyak.	Pembahasan mengenai sanksi ekonomi yang dikenakan oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat pada tahun (2006-2015).
26.	European Non-Traditional Security Theory: From Theory to Practice 1	(Floyd, 2011)	International Security	Studi keamanan non-tradisional.	Kesamaan teoritis dan kesamaan perspektif antara ketiga teori yaitu teori insekritisasi, teori emansipatoris, dan terutama inti	Keputusan politik suatu negara dalam konteks hubungan internasional mengenai isu keamanan menjadi salah satu hal yang merupakan bagian dari	Penulis menjelaskan pandangan yang berbeda mengenai keamanan non-tradisional yang sering

					dari teori sekuritisasi.	kepentingan nasional.	terlihat bertentangan satu sama lain.
27.	Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran dan dinamika Politik Kawasan Timur Tengah	(M. Syaroni Rofii, 2015)	Regionalism	Kesepakatan nuklir Iran yang dinilai membawa dampak signifikan terhadap politik kawasan Timur Tengah.	Peninjauan yang dilakukan oleh DK PBB terhadap aktivitas pengembangan senjata nuklir pada tahun 2003 di Iran.	Iran yang sudah terlibat dalam perjanjian NPT (<i>Non-Proliferation Treaty</i>) yang mana ditujukan untuk suplai energi listrik atau riset teknologi kesehatan, dan tujuan damai lainnya yang tidak berkaitan dengan senjata.	Fokus pembahasan dari sisi eksternal, mengenai sumber daya alam, terutama minyak menjadi salah satu alasan negara-negara barat hadir di kawasan Timur Tengah untuk memastikan Timur Tengah menjadi penyuplai untuk kebutuhan negara barat.
28.	Nuklir Iran dalam Neorealisme Defensif	(Mohamad Fuat Najib, 2022)	International Security	Iran yang mengembangkan teknologi nuklir sebagai upaya untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman hegemoni dari kekuatan lain di wilayah tersebut, terutama dari Amerika	Iran menyadari ancaman hegemoni di Timur Tengah dari Amerika Serikat, hal ini yang menyebabkan Iran terus mengembangkan teknologi nuklirnya. Sebab, selain kekuatan militer dan	Iran sebagai negara yang memiliki nuklir menjadi sebuah ancaman bagi negara kawasan juga bagi Amerika Serikat, karena Amerika Serikat memiliki kekuatan dalam hegemoni di kawasan Timur Tengah.	Penggunaan teori <i>Defensive Neorealism</i> .

				Serikat, yang mengancam kedaulatan Iran.	ekonomi, nuklir dianggap sebagai kekuatan untuk mencapai <i>balance of power</i> .		
29.	Neorealist theory Book Title: International Relations Book Subtitle: A Self-Study Guide to Theory	(Spindler, 2013)	International Politics	Perbedaan antara pemikiran realis dan neorealis dalam studi Hubungan Internasional .	Dalam sistem internasional terdiri dari dua komponen; yaitu struktur sistem suatu negara sebagai unit yang berinteraksi, dan bertindak dalam sistem.	Membahas mengenai konstelasi sosial di mana unit-unit kekuasaan (negara dalam hubungan internasional) berada berdampingan tanpa otoritas yang lebih tinggi yang dapat memaksakan standar perilaku kepada negara lain dan dengan demikian melindungi negara lain dari serangan terhadap satu sama lain.	Penggunaan teori pasar untuk menjelaskan bagaimana struktur sistem internasional membentuk perilaku negara-negara dengan cara yang sama seperti kekuatan pasar dari ekonomi pasar yang kompetitif.
30.	Nuclear Myths and Political Realities	(Waltz, 1990)	International Security	Pemahaman implikasi strategis senjata nuklir yang diterapkan pada kebijakan militer dan dengan demikian bertentangan dengan logika	Negara yang memiliki nuklir terus bersaing secara militer dengan beberapa negara lainnya yang juga memiliki senjata nuklir	Senjata nuklir yang menjadikan perdamaian antarnegara, karena akbat yang dihasilkan dari perang nuklir sangatlah ekstrem pada stabilitas dunia internasional.	Pembahasan mengenai suatu negara yang berstatus quo dengan senjata konvensional harus mengetahui sejauh

				senjata konvensional dan nuklir.	sebagai kepentingan keamanannya.		mana power yang harus dimanfaatkan dalam mengimplementasikan kebijakannya.
31.	Theory of International Politics	(Waltz, 1990)	International Politics	Dalam politik internasional atau ekonomi politik internasional, negara-negara berusaha untuk menjamin kelangsungan hidup bernegara.	Keamanan dalam studi hubungan internasional adalah prioritas utama, yang mana rivalitas kekuasaan dan konflik antar negara harus memiliki kemampuan dari aspek militer untuk melawan negara lain.	Kecenderungan suatu negara untuk mengejar keseimbangan kekuatan melalui kekuatan militer yang menimbulkan ancaman bagi negara lain.	Pembahasan mengenai negara yang harus mengeluarkan banyak atau sedikitnya jumlah anggaran pertahanan, serta kewajiban negara membuat senjata nuklir.
32.	Defining the National Interest	(Lake, 1981)	Foreign Policy	Tolak ukur dari kebijakan luar negeri terutama pada Amerika Serikat, atau kepentingan nasional suatu negara.	Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dinilai harus konsisten memberikan fleksibilitas pada sistem demokrasi dalam negeri, tetapi juga harus berdasarkan pada kesepakatan mengenai kepentingan nasionalnya.	Idealisme suatu negara yang mempengaruhi kepentingan nasionalnya, dengan demikian kebijakan luar negeri dibuat berkelanjutan dengan politik dalam negeri sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.	Perdebatan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara tradisional serta harus mencapai keseimbangan antara idealisme, kepentingan, dan power.
33.	National Interest: A Vindication	(Frankel, 1969)	International Politics	Gagasan dari suatu kepentingan	Konflik tradisional suatu negara	Aktor negara dalam mewujudkan	Pembahasan mengenai

				nasional harus terikat dengan krisis yang dialami negara tersebut.	harus diimbangi dengan pentingnya pertumbuhan politik dalam negeri sehingga lebih terintegrasi dengan kebijakan luar negeri.	perdamaian dunia hanya jika kepentingan nasionalnya terpenuhi dan memiliki tujuan yang sama dengan negara lain.	politik kekuasaan yang seringkali tidak mampu memahami bahwa kepentingan suatu negara yang tidak terlayani dengan baik.
34.	Security; A New Framework of Analysis	(Buzan et al., 1998)	International Security	Keamanan dalam sektor militer dan ekonomi.	Ragam bentuk respon tekanan tersebut bisa saja diluar aspek militer, tetapi juga dapat berkaitan dengan sektor ekonomi sehingga hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi asing dan perdagangan internasional.	Faktor geografis, sejarah, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi proses sekuritisasi.	Ilmu ekonomi liberal yang memisahkan sektor ekonomi dan politik.
35.	Geopolitical Fears, Geoeconomic Hopes, and the Responsibilities of Geography	(Sparke, 2007)	International Political Economy	Geopolitik dan geoekonomi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat.	Konsep geoekonomi utopis mengenai penyebaran <i>free trade</i> yang seharusnya dibawa oleh intervensi militer Amerika	Wacana geoekonomi mengenai senjata pemusnah massal dan hubungan terror yang menjadi alasan perang.	Pembahasan mengenai peningkatan perdagangan lintas batas yang dinamis dan beragam

					Serikat ke Timur Tengah.		antara Irak dan Iran.
36.	Asia–Europe–United States: the geoeconomics of Uncertainty	(Sidaway, 2005)	International Political Economy	Perdagangan internasional yang mengartikulasikan hubungan euro-dollar.	Konfigurasi ulang kebijakan geopolitik Amerika Serikat pasca 9/11	Geoekonomi yang mencakup perjanjian bilateral dan multilateral Amerika Serikat-Asia terutama pada Timur Tengah yang bertumpu pada surutnya dominasi Amerika Serikat.	Dampak geoekonomi dalam hubungan internasional dan kerangka integrasi Eropa.
37.	Politics among Nations; The Struggle for Power and Peace	(Hans J. Morgenthau, 1949)	International Politics	Tujuan dari kebijakan luar negeri, seperti perolehan sumber bahan mentah, penguasaan jalur laut, atau perubahan wilayah.	Perbedaan antara kebijakan ekonomi suatu negara untuk kepentingan nasionalnya dan kebijakan ekonomi yang merupakan instrumen kebijakan politik.	Membahas mengenai kebijakan ekonomi, teritorial, atau militer yang dibahas dalam forum internasional.	Perbedaan tipe imperialisme, seperti imperialisme ekonomi, militer, dan budaya.
38.	Faktor penyebab keluarnya Amerika Serikat dari <i>Joint Comprehensive plan of Action (JCPOA)</i> tahun 2018	(Nurfitri Nugrahingsih, 2022)	International Security	Kebijakan Donald Trump yang dinilai kontroversial terhadap program nuklir Iran.	Kondisi keamanan nasional Amerika Serikat pasca keluar dari JCPOA yang sesuai dengan slogan kampanye Trump yaitu <i>"Make America Great</i>	Keluarnya Amerika Serikat dari kecenderungan Trump dalam mengambil langkah yang mengarah kepada <i>hard power</i> .	Penelitian ini bersifat idiosinkretik yang memandangkan keputusan Donald Trump berdasarkan aspek kognitif.

					<i>Again" atau "American First".</i>		
39.	Rethinking Governance (The Centrality of the State in Modern Society); A state-centric relational approach	(Bell & Hindmore, 2012)	International Development	Tata kelola dari perspektif relasional yang berpusat pada negara dan mendefinisikan tata kelola sebagai alat, strategi, dan hubungan yang digunakan oleh negara untuk membantu pemerintahan	Pengaruh kompleks industri militer terhadap kebijakan pertahanan dan pengadaan Amerika Serikat.	Meskipun negara dapat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada aktor non-negara, tetapi negara tetap memiliki wewenang untuk mengubah proses pemerintahan yang baru.	Pasar bebas dalam proses pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan atau memulihkan kekuatan suatu negara dalam mencapai kestabilan ekonomi.
40.	Uncertainty over the Joint Comprehensive Plan of Action: Iran, the European Union and the United States	(Belal, 2019)	International Political Economy	Ketidakpastian kesepakatan nuklir Iran dari sudut pandang Amerika Serikat, Uni Eropa. Sedangkan Iran mengharapkan konsesi ekonomi dari Uni Eropa.	Uni Eropa yang mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan berkontribusi terhadap stabilitas Timur Tengah, sehingga Iran memandang kesepakatan itu sebagai imbalan ekonomi atas penghentian program nuklirnya.	Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang mengadakan pertemuan darurat pada 10 Juli 2019 untuk membahas perkembangan terkini. Sebaliknya, Iran telah setuju untuk membatalkan keputusannya mengenai pemberian kompensasi ekonomi.	Perubahan sosio-ekonomi yang dialami Iran melalui periode 2013-2016.
41.	U.S. Military Deployment	(Heo & Ye, 2019)	International Political Economy	Militer Amerika Serikat yang	Dampak positif dari adanya	Dampak ekonomi dari pengerahan	Pembahasan mengenai

	nt and Host-Nation Economic Growth			mempengaruhi investasi, perkembangan politik, dan pertumbuhan ekonomi.	pasukan militer Amerika Serikat terhadap investasi dan perdagangan internasional, tetapi tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan politik.	militer Amerika Serikat terhadap investasi regional.	<i>Foreign Direct Investment</i> yang fokus utamanya di Amerika Latin.
42.	Tinjauan Historis Mengenai Kepentingan Ekonomi Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat Era Isolasionis	(Syahdan, 2015)	International Political Economy	Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bidang ekonomi.	Ekonomi Amerika Serikat terhadap perdagangan internasional, meskipun pada era isolasionis dapat secara aktif mengejar pembukaan pasar.	Kepentingan ekonomi yang merupakan salah satu landasan penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.	Menggambarkan politik luar negeri Amerika Serikat pasca kemerdekaan dengan istilah isolasionis.
43.	Restructuring Foreign Policy: A Neglected Phenomenon in Foreign Policy Theory	(Holsti, 2016)	Foreign Policy	Perubahan besar dalam kebijakan luar negeri suatu negara baik dalam hubungan diplomatik, budaya, komersial, militer, dan ekonomi.	Tindakan dan komitmen yang diarahkan ke luar negeri bukanlah satu-satunya indikator untuk reorientasi kebijakan luar negeri,	Jenis reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri yang menjadi sebuah fenomena dalam politik internasional.	Studi kasus pada Burma, Myanmar yang merupakan salah satu dari banyaknya kasus yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk melakukan reorientasi kebijakan luar negerinya.

44.	International Institutions and Compliance with Agreements	(McLaughlin Mitchell et al., 2007)	International Law	Keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam menyelesaikan berbagai isu internasional yang mempengaruhi proses kepatuhan pada setiap negara.	Dalam merealisasikan kepatuhan, lembaga seperti organisasi dan rezim internasional harus memungkinkan negara-negara super power untuk bernegosiasi dan bekerjasama dengan negara dunia ketiga dalam menyelesaikan suatu isu, supaya negara-negara yang memiliki hegemoni ini tidak akan mendominasi dalam suatu perjanjian.	Tidak semua perjanjian mempunyai dampak yang sama, misalnya negara yang lebih kuat atau negara super power seperti Amerika Serikat contohnya dapat lebih cenderung tidak mematuhi perjanjian yang menguntungkan negara yang lebih lemah.	Efek aktif dan pasif dari organisasi internasional pada kepatuhan yang mengubah pengambilan keputusan strategis dalam negosiasi tentang isu-isu kontroversial.
45.	Globalism's Impact on the Geopolitics of the Middle East	(Patterson, 2022)	Regionalism	Pentingnya unsur geografi dalam strategi dan budaya untuk mempertimbangan geopolitik pada saat menyusun dan menganalisis kebijakan luar negeri di wilayah	Selat Bab el-Mandeb dan selat Omuz sebagai wilayah yang memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan dan merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional di Timur	Membahas mengenai geografi kawasan Timur Tengah yang berdampak pada signifikansi dan stabilitas dunia internasional.	Pembahasan mengenai sengketa wilayah agama di Timur Tengah.

				Timur Tengah.	Tengah yang menghubungkan Teluk Oman dengan Teluk Persia.		
46.	Prospects for the Iran nuclear deal	(Fraiooli & Rhode, 2020)	International Development	Kembalinya Amerika Serikat pada era Joe Biden ke JCPOA yang berdampak pada pemulihan keringanan sanksi yang dijatuhkan oleh Donald Trump ke Iran.	Laporan IAEA bahwa Iran yang sebelumnya sudah mengurangi kelebihan LEU (<i>Low Enriched Uranium</i>) dari 10.000 kg menjadi 300 kg (dalam bentuk uranium hexafluoride, atau UF6), lalu pada tahun 2020, persediaan Iran berjumlah 4000-5000 kg UF6. Jumlah ini dinilai cukup untuk membuat tiga senjata nuklir jika diperkaya lebih lanjut hingga mencapai tingkat senjata.	Membahas mengenai Iran yang sedang memproduksi cukup uraniumnya dalam pantauan JCPOA.	Rencana ambisius Joe Biden untuk memulihkan hubungan baik Amerika Serikat – Iran dengan bergabung kembali ke JCPOA.
47.	Nuclear Iran and the Persian Gulf	(Nader, 2013)	Regionalism	Strategi dan kemampuan militer Iran di Teluk Persia.	Iran yang membuat isyarat ancaman di Teluk Persia untuk	Senjata nuklir Iran yang dinilai memiliki tujuan untuk mengusir Amerika	Pembahasan mengenai kerja sama ekonomi Iran dan Qatar yang

					mencegah Amerika Serikat menerapkan sanksi yang sangat keras terhadap bank sentralnya dan juga untuk mencegah Uni Eropa memboikot minyak Iran.	Serikat dari wilayah Teluk Persia dengan melemahkan rezim-rezim pro Amerika di kawasan tersebut.	membuat kemungkinan agresi militer terhadap Qatar lebih kecil bahkan jika Iran memiliki senjata nuklir.
48.	Rejoining the Iran Nuclear Deal: Not So Easy	(O'toole, 2021)	Foreign Policy	Krisis yang dinilai paling sulit dan mendesak pada era Joe Biden berkaitan dengan perjanjian nuklir Iran di tahun 2015.	Masa pemerintahan Donald Trump yang memberlakukan serangkaian sanksi baru yang belum pernah dijatuhkan terhadap Iran sebelumnya, termasuk sanksi ekonomi Amerika Serikat yang semakin parah.	Membahas mengenai pemerintahan Amerika Serikat era Donald Trump yang menerapkan sanksi sekunder terhadap sektor ekonomi Iran terutama pada sektor konstruksi, manufaktur, pertambangan, dan perminyakan.	Amerika Serikat yang pada era Joe Biden akan bergabung kembali pada era Joe Biden dengan perjanjian tersebut jika Iran kembali mematuhi batasan nuklirnya dan setuju untuk melanjutkan negosiasi.
49.	The Sanctions Paradox; Economic Statecraft and International Relations	(Drezner, 1999)	International Political Economy	Konsep mengenai sanksi ekonomi yang terjadi secara paradoksal.	Membandingkan respon Amerika Serikat terhadap Iran dalam menembangkan senjata nuklirnya dengan konsep	Membahas mengenai <i>economic coercion</i> yang menunjukkan bawa strategi kedua negara bergantung pada <i>costs</i> dan <i>stalemate</i> dari ekspektasi	Fenomena <i>economic coercion</i> di Uni Soviet dan <i>economic statecraft</i> proliferasi nuklir di Korea Utara.

					<i>sanctions paradox.</i>	terhadap suatu konflik.	
50.	Global Energy Markets and the Persian Gulf	(Sim, 2020)	International Political Economy	Teluk Persia sebagai pemangku kepentingan utama dalam sistem energi global sebanyak 65% yang bergantung pada minyak dan gas alam.	Teluk Persia ini menyebabkan perlambatan ekonomi di Asia dan pada perang dagang Amerika Serikat – China yang juga terikat dengan kebijakan proteksionis menya.	Wilayah Teluk Persia yang memiliki sumber bahan bakar fosil, ekspor minyak mentah (55%), cadangan gas (40%), dan merupakan produsen LNG (<i>Liquefied Natural Gas</i>) terbesar.	Respons negara-negara pada kawasan Teluk Persia terhadap tren energi global kemungkinan besar akan menimbulkan dampak politik di tingkat domestik, regional, dan internasional.
51.	The Global Trump; Structural US populism and Economic Conflicts with Europe and Asia	(Welfens, 2019a)	International Political Economy	Kebijakan ekonomi Trump yang dinilai kontradiktif, seperti halnya konflik tarif impor Amerika Serikat – China, dan Amerika Serikat – Uni Eropa.	Kebijakan administrasi pada pemerintahan Trump terutama di bidang perdagangan, investasi asing, yang berdampak pada beberapa negara dan kawasan.	Membahas mengenai strategi Amerika Serikat pada era pemerintahan Donald Trump yang lebih menekankan kepentingan pemulihan ekonomi nasional.	Aspek ketenagakerjaan, dan kebijakan transatlantik antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.
52.	The Evolution of US Policy towards Iran and the Iranian Nuclear Program	(Kazan, 2021)	Foreign Policy	Peran penting presiden Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.	Pengaruh domestik dan internasional yang mendorong Amerika untuk mengejar kesepakatan multilateral	Perdagangan dan investasi Amerika-Iran yang dilarang dan dibekukan, sanksi pada sektor minyak Iran, serta sanksi kepada negara yang	Penelitian ini sebagian besar bersifat idiosinkretik.

					atas program nuklir Iran, serta perkembangan hubungan Amerika Serikat terhadap Iran dan program nuklirnya.	diketahui memiliki bisnis dengan Iran.	
53.	Politics of Oil and Nuclear Technology in Iran	(Torbat, 2020)	Diplomacy	Diplomasi nuklir dengan Iran.	Garis waktu program nuklir Iran dari 1957-2019, dan strategi diplomasi koersif Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membongkar bagian-bagian penting dari infrastruktur nuklir Iran.	Membahas mengenai sanksi, fasilitas nuklir Iran di Fordow dan Natanz, inspeksi dan transparansi dengan IAEA, pembangunan reaktor baru dan pengiriman bahan bakar nuklir, serta pembatasan kapasitas pengayaan uraniumnya.	Amerika Serikat yang meningkatkan tekanannya terhadap Iran dengan menggulingkan rezim Islam.
54.	Re-thinking geoconomics: Towards a political geography of economic geographies	(Moisio, 2019)	International Political Economy	Pemahaman tentang geoekonomi sebagai strategi pemasaran negara, dan kesenjangan antara geoekonomi dan geopolitik.	Geoekonomi sebagai suatu wacana geostrategis berbasis non-militer yang berfokus pada perdagangan regional.	Membahas mengenai geoekonomi sebagai salah satu strategi untuk menganalisis kebijakan luar negeri dengan penerapan kekuatan ekonomi suatu negara untuk mencapai tujuan strategis.	Pentingnya urbanisasi antar aktor yang mengartikulasikan pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
55.	Pax Americana vs. Inclusive	(Parsi, 2021)	International Security	Seluruh prinsip kebijakan Amerika di	Perkembangan di Timur Tengah tetap tidak	Dengan menerapkan sanksi yang merugikan	Sebagian besar mitra keamanan Amerika di

	Security in the Middle East			Timur Tengah telah berubah menjadi “konfrontasi dengan Iran” terlepas dari dampak kebijakan ini yang mengganggu stabilitas kawasan.	terlepas dari hegemoni Amerika Serikat, sementara multipolaritas akan menghalangi dominasi regional oleh negara lain sehingga Amerika Serikat harus melepaskan dominasinya dari Teluk Persia dan lebih memprioritaskan keterlibatan diplomatik dan ekonomi, dibandingkan hegemoni militernya.	masyarakat terhadap negara-negara yang tidak patuh dan menjual senjata bernilai miliaran dolar kepada mitra keamanan Amerika Serikat, hegemoni Amerika Serikat menjadi cenderung memperburuk faktor-faktor yang membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil.	Teluk Persia lebih memilih Amerika Serikat untuk terus menyeimbangkan dan membendung saingan utamanya, yaitu Iran
56.	How Close is Iran to a Nuclear Bomb?	(Yadlin & Asculai, 2021)	International Security	Pengumuman bahwa Iran telah mulai memperkaya uranium hingga tingkat 20% di fasilitas yang terlindungi dengan baik di wilayah Fordow.	Pengumuman Iran yang dimaksud sebagai provokasi kepada negara-negara super power untuk mencabut sanksi yang dikenakan pada Iran, dan bermaksud untuk mengakumulasi kuantitas uranium untuk memproduksi alat	Perkembangan dan status sistem persenjataan di Iran, seperti halnya kompleksitas dan lamanya proyek pengembangan senjata, kesesuaian dengan program pengayaan dan program senjata.	Kontroversi mengenai durasi dan tingkat pengembangan sistem persenjataan – yang dibantah oleh Iran bahwa mereka sedang mengembangkannya.

					peledak nuklir.		
57.	Iran and the New International Order in the Light of the Strategies of Shaping, Opposing, and Complying	(Ardakani & Mir-Mohammadi, 2023)	International Law	Berbagai peran aktor negara dalam perubahan tatanan internasional pada masa transisi menuju orde baru di Iran.	Peran konstruktif Iran dalam tatanan internasional, seperti konsep politik, modal sosial internasional, syarat kognitif yang mempengaruhi tatanan baru.	Perubahan tatanan internasional yang disebabkan oleh kerentanan geopolitik dan sanksi dari sektor ekonomi dan politik internasional.	Jurnal ini mengklaim bahwa pemerintah pada tingkat kekuasaan mana pun dapat mengadopsi strategi yang diperlukan dalam satu atau lebih dimensi tatanan transisi agar dapat memainkan peran yang konstruktif.
58.	Geopolitical and Geostategic Importance of the Iranian Islands in the Persian Gulf	(Yazdani & Yanzhe, 2022)	Diplomacy	Posisi Teluk Persia yang dinilai sangat penting bagi Iran di kancah domestik, regional, dan internasional, sehingga kebijakan luar negeri strategis Iran selalu dirumuskan dengan mempertimbangan kawasan Teluk Persia.	Hubungan ekonomi Amerika Serikat yang dekat dengan wilayah Teluk Persia sebagai gudang minyak dunia dengan biaya produksi yang rendah, biaya transit yang murah sebanyak 250.000 hingga satu juta ton di setiap sumur	Iran di Teluk Persia dianggap sebagai bagian penting dari sektor geopolitik, geostrategis, geoekonomi, geowisata, dan keamanan militer.	Pandangan bahwa negara mana pun yang dapat menguasai tiga selat; Bab-el-Mandeb, Hormuz dan Malaka, mereka akan menguasai dunia.

					minyak di Teluk Persia.		
59.	Foreign policy analysis, globalisation and non-state actors: state-centric after all?	(Bauman & Stengel, 2014)	Foreign Policy	Pembuatan kebijakan luar negeri yang kompleks di dunia setelah globalisasi.	Faktor yang mempengaruhi non-state actor terhadap pembuatan kebijakan adalah dengan mengetahui struktur peluang politik suatu negara, dan sumber daya.	Kebijakan luar negeri saat ini masih berfokus pada aktor negara, dan cenderung mengabaikan peran aktor non-negara, seperti aktor swasta, NGO, dan perusahaan transnasional.	Aktor-aktor swasta dan perusahaan transnasional seperti kelompok kepentingan etnis, jaringan advokasi transnasional, dan media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penetapan suatu kebijakan.
60.	Iran Aviation Industry and Nuclear Deal: The Poster Child of Sanctions and JCPOA	(Dadpay & Edward, 2019)	International Regimes	Dampak JCPOA terhadap industri penerbangan Iran, dan sanksi terhadap Iran yang mengabaikan variabel makroekonomi dan daya saing industri komersial Iran.	Di kancah internasional, maskapai penerbangan asing yang justru merasakan manfaat langsung dari JCPOA secara cepat dibandingkan maskapai penerbangan dari Iran.	Iran adalah pasar domestik terbesar untuk perjalanan udara di Timur Tengah, dengan permintaan domestik yang kuat untuk perjalanan udara domestik dan regional.	Iran pada masa pemerintahan Hassan Rouhani berusaha memanfaatkan peluang dengan mengambil langkah besar untuk merenovasi armada udara Iran dan menyoroti manfaat dari pencapaian kesepakatan nuklir.
61.	The JCPOA	(Izewicz, 2017)	International Regimes	Mekanisme penegakan	Kemajuan Iran dalam	Tanpa adanya JCPOA,	Iran dapat memperoleh

	Procurement Channel			hukum yang kredibel sehingga dapat mencegah pengadaan barang-barang nuklir secara illegal.	pengayaan uranium dan sumber daya teknologi untuk memajukan aspirasi nuklirnya, dan terbentuknya JCPOA adalah untuk mengawasi keamanan regional dan rezim non-proliferasi global, sehingga dapat membatasi program pengembangan nuklirnya.	mekanisme esensi dari jalur pengadaan perdagangan nuklir illegal oleh Iran akan terus berlanjut.	h sebagian besar barang terkait nuklir yang dibutuhkan nya dari negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia. Negara-negara tersebut mempunyai i basis manufaktur yang cukup kuat dan lebih lunak dalam mengendalikan ekspor barang-barang sensitif.
62.	Nuclear Risks and Arms Control - Problems and Progresses in the Time of Pandemics and War	(Cotta-Ramusino et al., 2022)	International Security	Usaha dan negosiasi untuk menyelamatkan perjanjian JCPOA.	Jika negosiasi dari beberapa negara dan Amerika Serikat era Joe Biden kembali ke dalam perjanjian JCPOA, pada kenyataannya, hal itu tidak akan mengurangi kekuatan sanksi terhadap Iran.	Penolakan Trump terhadap perjanjian nuklir, bahkan memberikan tekanan maksimum terhadap Iran.	Kesepakatan mengenai pembaruan terhadap perjanjian nuklir Iran.

63.	America, Oil, and War in the Middle East	(Jones, 2012)	Regionalism	Upaya suatu kawasan untuk menguasai Teluk Persia yang dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat, sehingga mendapatkan respon dari aspek militer Amerika Serikat.	Militerisasi menjadi sebuah fenomena regional, dan hal ini semakin menguatkan diktator di wilayah Teluk Persia yang semakin bersikap asertif dan meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk Persia.	Beberapa negara disekitar kawasan Teluk Persia berusaha untuk mencapai keamanan negaranya melalui pembelian senjata yang bernilai miliaran dolar, dan Amerika Serikat merespon dengan menyediakan industri senjatanya.	Pola militerisme yang dimulai di Teluk Persia pada tahun 1970an sebagian merupakan hasil dari dukungan Amerika Serikat.
64.	American Grand Strategy for an Emerging World Order	(Scott Lawless, 2020)	Foreign Policy	Pergeseran geopolitik saat ini memerlukan revitalisasi strategi besar Amerika Serikat untuk pembentukan tatanan keamanan baru untuk kepentingan nasionalnya.	Dengan mencapai keseimbangan antara legitimasi dan kekuasaan, Amerika Serikat dapat memimpin koalisi yang mewakili banyak negara yang berupaya untuk lebih terlibat dalam pembangunan tatanan liberal.	Tujuan dari strategi besar Amerika Serikat sebagai kepentingan nasionalnya adalah menjaga perekonomian global yang terbuka dan dinamis serta melibatkan pengaruh militer, ekonomi, politik, budaya. Salah satunya adalah dengan pencegahan nuklir.	Kepentingan kelompok otoriter untuk menciptakan tatanan global yang tidak liberal dan multipolar sehingga menjadikan dunia internasional aman bagi rezim neo-otoriter.
65.	Diplomacy	(Morgenthau, 1946)	Diplomacy	Diplomasi yang digunakan sebagai teknik dalam	Konflik nasional berupa ekonomi, sosial, atau	Situasi politik yang memungkinkan pengambilan keputusan	Metode diplomasi legalistik terhadap isu-isu

				merumuskan kebijakan luar negeri.	konflik konstitusional tidak memerlukan adanya banding pada hukum internasional, tetapi kepada politik dalam negeri.	berdasarkan hukum internasional adalah kebijakan internasional atau kawasan yang sedang dipertimbangan secara hukum.	sekunder di DK-PBB.
66.	Perfect Deterrence	(Frank C. Zagare & D. Marc Kilgour, 2004)	International Security	Pasukan militer Amerika Serikat menghalangi dan mengalahkan ancaman keamanan terorganisir terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat, termasuk mencegah adanya serangan nuklir.	Senjata nuklir dapat dijadikan sebagai stabilitas politik internasional, menstabilkan <i>status quo</i> , dan juga dapat memicu <i>the last great war</i> .	Deterrence adalah hal yang paling mungkin terjadi ketika biaya perang tinggi, dan ketika adanya keberadaan senjata pemusnah massal. Perang nuklir pada dasarnya tidak rasional karena tidak akan mungkin terjadi ancaman pembalasan.	Kebijakan konvensional deterrence yang dilarang untuk digunakan untuk mencegah adanya agresi.
67.	Great Power Competition: Lessons from the Past, Implications for the Future	(Vuving, 2020)	International Politics	Dinamika masyarakat sipil, teknologi, geografi, ekonomi terhadap persaingan negara-negara super power.	Negara-negara besar merupakan penentu dalam sistem internasional, tetapi keseimbangan kekuatan negara super power juga sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem yang belum tentu	Munculnya senjata nuklir mengharuskan negara super power juga harus memiliki senjata pemusnah massal, meskipun hal ini mengurangi penyebab struktural perang	Pembahasan mengenai kekuatan teknologi memberikan keseimbangan di antara negara-negara besar, yang membuat perbedaan sering kali

					merupakan aktor negara namun mendapatkan keuntungan dan dinamisme yang luar biasa dari upaya negara super power.	antarnegara super power.	didukung oleh faktor sosial, ekonomi, dan organisasi.
68.	Encyclopedia of American Foreign Policy	(Richard Dean Burns & Louise B. Ketz, 2002)	Foreign Policy	Strategi dan diplomasi nuklir, serta kebijakan ekonomi	Amerika Serikat akan menggagalkan negosiasi dengan adanya konsep dari otoritas internasional pengembangan atom sehingga negara manapun tidak akan melanggar perjanjian untuk membuat senjata nuklir. Dan konsep perekonomian Amerika Serikat yang bervariasi dan kompleks dalam perdagangan internasional	NPT dan IAEA tidak menerima senjata baru untuk pengamanan fasilitas nuklir dan kontroversi di Amerika Serikat mengenai senjata nasional juga mendapatkan respon dari negara super power lainnya.	Penggambaran dari negara lain terkait kesan masyarakat sipil Amerika Serikat, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain diluar kawasan Timur Tengah.
69.	The Nuclear Taboo	(Tannenwald, 1999)	International Security	Amerika Serikat dan pencegahan penggunaan senjata	Rezim non-proliferasi nuklir menunjukkan serangkaian	Amerika Serikat telah mengecualikan penggunaan senjata nuklir untuk alasan	Buku ini menjelaskan bahwa norma telah memaikan

				nuklir sejak tahun 1945.	norma antinuklir yang membantu struktur hierarki negara	politik dan normatif, dan pada akhirnya dalam delegitimasi senjata nuklir telah membatasi pertahanan dalam sistem internasional karena adanya beban moral suatu negara dan <i>cost</i> yang dikeluarkan untuk menggunakan senjata nuklir.	n peran yang jauh lebih penting dalam membatasi penggunaan senjata nuklir.
70.	Donald Trump in Power: Discourse, Performativity, Identification	(Venizelos, 2023)	International Politics	Identifikasi politik pada era Donald Trump.	Respon Trump terhadap liberalisme dan elit politik sebagai sumber kelemahan ekonomi, politik, dan sosial di Amerika menunjukkan campuran ideologi politik yang menyatukan tradisi populisme Amerika dengan proteksionisme anti-globalis (pro-kapitalis namun anti neoliberal).	Sloan Trump America First mengedepankan orientasi realis dalam kebijakan luar negeri.	Penelitian ini menggunakan analisis wacana dan visual untuk mempelajari retorika dan performativitas dari Donald Trump.

71.	President Trump versus his Administration	(Eldad Shavit, 2019)	Foreign Policy	Proses kebijakan dan sistem pemerintahan Presiden Donald Trump.	Amerika Serikat menanggapi penguatan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, dan pengawasan terhadap Iran untuk tidak melanggar perjanjian nuklir, termasuk keputusan untuk mulai memperkaya uranium hingga tingkat 20%.	Keputusan Amerika untuk keluar dari perjanjian nuklir pada saat itu dan memperbarui sanksi terhadap Iran, dan Iran yang meningkatkan sikap konfrontatifnya di Timur Tengah.	Tekanan internal Amerika Serikat pada tahun 2019.
72.	Donald Trump's Personality and the Future of Iranian Nuclear	(Riki Rahman & Hakim Abdullah, 2023)	Foreign Policy	Kepribadian Trump yang memainkan peran penting terhadap menentukan arah kebijakan Amerika Serikat dan Iran.	Rasionalitas individu juga dapat terjadi dalam menganalisis instrumen kebijakan luar negeri (<i>emotional bias</i>), seperti kebijakan Trump yang menolak kesepakatan nuklir Iran yang mencerminkan kebijakannya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya.	Amerika Serikat menekan Iran untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya karena hal tersebut dapat mengancam hegemoninya di Timur Tengah.	Pembahasan mengenai ketidakpastian ekonomi Amerika yang disebabkan oleh invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak.
73.	Conceptualizing regional	(Mikael Wigell, 2015)	International Political Economy	Potensi strategi geoekonomi	Strategi ekonomi untuk	Kebijakan luar negeri pada suatu kawasan	Pembahasan mengenai

	powers' geo-economic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberalism			dan kekuatan regional, dan empat strategi ideal seperti neo-imperialisme, neo-merkantilisme, hegemoni, dan institusionalisme liberal.	mencapai tujuan geopolitik yang lebih luas, misalnya dominasi politik internasional, dan untuk mencapai suatu kepentingan nasional.	terhadap perspektif geoekonomi karena geoekonomi sebagai penggunaan kekuatan ekonomi secara geostrategis yang menjadi aspek penting dalam kekuatan regional.	strategi geoekonomi neo-merkantilisme.
74.	Iran and the Changing Military Balance in the Gulf	(Cordeman & Hwang, 2019)	Regionalism	Keseimbangan militer di Teluk Persia.	Kemampuan Iran yang terus meningkat untuk mengancam aliran minyak bumi keluar dari Teluk dan mengintimidasi atau menyerang pergerakan angkatan laut diseluruh Teluk, hal ini menimbulkan ancaman besar terhadap ekspor sekitar 20% pasokan minyak dunia dan sebagian besar ekspor alam cair.	Perubahan hubungan strategis antara Iran dengan negara di kawasan Timur Tengah, serta ketidakpastian peran Amerika Serikat, meningkatnya kemampuan Iran dalam perang asimetris di wilayah Teluk Persia, dan dampak keberhasilan Iran dalam menciptakan senjata nuklir.	Peningkatan kekuatan rudal Iran untuk menyerang sasaran militer Arab dan Amerika.
75.	Tracing Discursive Strategies	(Sevgi Balkan-	International Security	Amerika Serikat yang terlibat	Strategi diskursif Amerika	Posisi Amerika Serikat	Iran sedang berjuang

to Understand the U.S. Withdrawal from the Iranian Nuclear Deal	Sahin, 2020)		dalam legitimasi tindakan antagonistiknya terhadap Iran dengan menerapkan strategi diskursif dalam pengunduran diri Amerika dari JCPOA.	berdasar pada konteks historis untuk mempertahankan persepsi ancaman terhadap Iran dengan memperluas wacana anti-Iran.	sebagai negara yang terus mempromosikan perdamaian dunia memiliki tanggung jawab untuk mencegah Iran merusak stabilitas regional, mendukung terorisme, dan memproduksi senjata nuklir	untuk hegemoni regional, yang secara otomatis akan mengancam kepentingan keamanan Amerika Serikat, dan Israel.
---	--------------	--	---	--	---	--

Berdasarkan dari 75 kajian literatur ilmiah yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sebagian besar analisis menggunakan pendekatan berorientasi keamanan, militer, sanksi, hegemoni, organisasi dan rezim internasional. Namun, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap JCPOA berkaitan dengan sanksi dari perspektif *sanction paradox*.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Nuklir sebagai Pemenuhan Keamanan Nasional

Salah satu konsep paling penting dan merupakan salah satu aspek kunci dalam memahami perilaku dan keputusan politik suatu negara dalam konteks hubungan internasional adalah mengenai isu keamanan yang menjadi salah satu hal yang merupakan bagian dari kepentingan nasional (Floyd, 2011). Beberapa negara juga masih menganggap bahwa aspek keamanan tradisional masih sangat krusial terhadap kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, beberapa negara terutama negara berkekuatan besar (*super power*) memutuskan untuk

memiliki senjata pemusnah massal sebagai pertahanan negara terutama pengembangan senjata nuklir yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu (Talbot, 2020).

Meskipun senjata nuklir seringkali dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia, namun senjata nuklir juga dapat berperan sebagai instrumen dalam menjaga perdamaian dan keamanan nasional. Keberadaan nuklir juga berhasil dalam menghilangkan miscalculation sebagai salah satu faktor yang mendasari kebijakan suatu negara untuk mengumumkan perang dengan memberikan kepastian bahwa dalam situasi perang nuklir, tidak ada pihak yang diuntungkan, karena perang nuklir pada dasarnya tidak rasional dan tidak akan mungkin terjadi adanya ancaman pembalasan. Senjata nuklir juga dapat dijadikan sebagai stabilitas politik internasional dan menstabilkan *status quo*, dan juga dapat dijadikan sebagai jaminan keamanan militer tertinggi dari suatu negara (*deterrence*) (Frank C. Zagare & D. Marc Kilgour, 2004). *Deterrence* adalah hal yang paling mungkin terjadi ketika adanya keberadaan senjata pemusnah massal, dan negara-negara yang memiliki senjata nuklir sebagai *deterrence* akan merumuskan kebijakan bahwa hal ini hanya akan menjadi respon terhadap ancaman keamanan nasional.

Akan tetapi, Robert Jervis mengatakan bahwa terdapat beberapa negara yang dengan menggunakan kepemilikan nuklir sebagai *deterrence* untuk mengintimidasi lawan dengan menunjukkan kapabilitas militernya untuk pemenuhan keamanan nasionalnya (*swaggering*). Hal ini dapat menjadi strategi *deterrence* untuk memperkuat persepsi ancaman bagi negara lain dengan harapan negara lain akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan (Jervis,

1989). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa negara yang sedang mengembangkan nuklir harus memiliki kemampuan militer yang kuat untuk mencegah adanya serangan balasan.

Sehingga keberadaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, kimia, dan biologis pada suatu negara yang dianggap sebagai pemenuhan keamanan nasional ini terkadang juga dapat mengancam keamanan negara lain (Kemhan Penanggung jawab et al., 2016). Ketika terdapat satu negara yang sedang mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir juga dikhawatirkan dapat menyebabkan proliferasi senjata dan meningkatkan risiko konflik regional.

Sebagaimana yang terjadi pada pengembangan nuklir di Iran yang mengubah dinamika konflik antar negara sebagai pertahanan keamanan nasionalnya, tentunya akan memiliki pengaruh di tingkat regional maupun internasional. Dengan demikian, nuklir Iran yang dikembangkan sebagai senjata ini dianggap sebagai strategi untuk memperkuat keamanan nasionalnya. Hal ini memicu respon dari negara lain, terutama negara *super power* yang memandang nuklir ini sebagai ancaman keamanan dengan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara *super power* tentu akan memainkan peran penting dalam merespon Iran yang sedang mengembangkan pengayaan uraniumnya ke tahap yang lebih tinggi, karena memandang nuklir Iran sebagai ancaman keamanan dan akan mengganggu stabilitas hegemoninya sebagai negara *super power*. Upaya Amerika Serikat untuk terus menekan pengayaan nuklir Iran dalam pemenuhan keamanan

nasionalnya dapat juga meliputi aspek diplomasi, sanksi embargo ekonomi, dan ancaman militer terhadap Iran.

2.2.2 *Hegemonic Stability* dalam Kerangka Rezim Internasional

Kepatuhan negara terhadap suatu rezim akan mencerminkan tindakan negara untuk mengikuti perjanjian dan hukum internasional tertentu. Salah satu aspek kepatuhan terhadap suatu norma (*adherence*) yaitu *hegemonic stability* yang merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini. Modelski menjelaskan bahwa tatanan dunia yang stabil dan perdamaian dunia memerlukan adanya stabilitas hegemonik yang dominan yang menyoroti pentingnya peran negara super power dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan atau sistem internasional yang stabil. Oleh karena itu, negara super power juga perlu berperan penting dalam mendukung stabilitas regional dan global, serta berpartisipasi dalam rezim atau perjanjian internasional (George Modelski, 2000).

Teori ini juga menjelaskan mekanisme negara *super power* dalam menciptakan rezim untuk mengatur perilaku negara sesuai aturan dan norma yang harus dipatuhi. Rezim juga memungkinkan negara *super power* untuk menetapkan aturan yang dapat memperkuat posisi mereka untuk memengaruhi negara *middle power*. Negara *super power* dalam *hegemonic stability* juga perlu mempertahankan suatu rezim yang dapat memperkuat dominasi dan kepentingan nasionalnya. Dengan mempertahankan rezim, negara *super power* dapat mengendalikan kepatuhan negara. Hal tersebut sejalan dengan perilaku kepatuhan suatu negara yang belum tentu bersifat proposisi, melainkan dapat

dipahami dengan posisi suatu negara dalam sistem global dan regional yang berkaitan dengan sifat rezim (Arend & Kreps, 2006). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ikenberry bahwa suatu tatanan kooperatif dunia dibangun berdasarkan kesepakatan negara-negara yang memiliki hegemoni dalam sistem internasional dan memperoleh komitmen dari negara-negara dunia ketiga. Kesepakatan internasional dapat terjadi jika rezim memiliki pengaruh yang independen terhadap negara. Ketika negara bergabung pada suatu rezim, mereka pada dasarnya sepakat untuk mematuhi aturan yang ada. Sehingga, rezim dapat menjadi instrumen yang bersifat mengikat (Ikenberry, 1998).

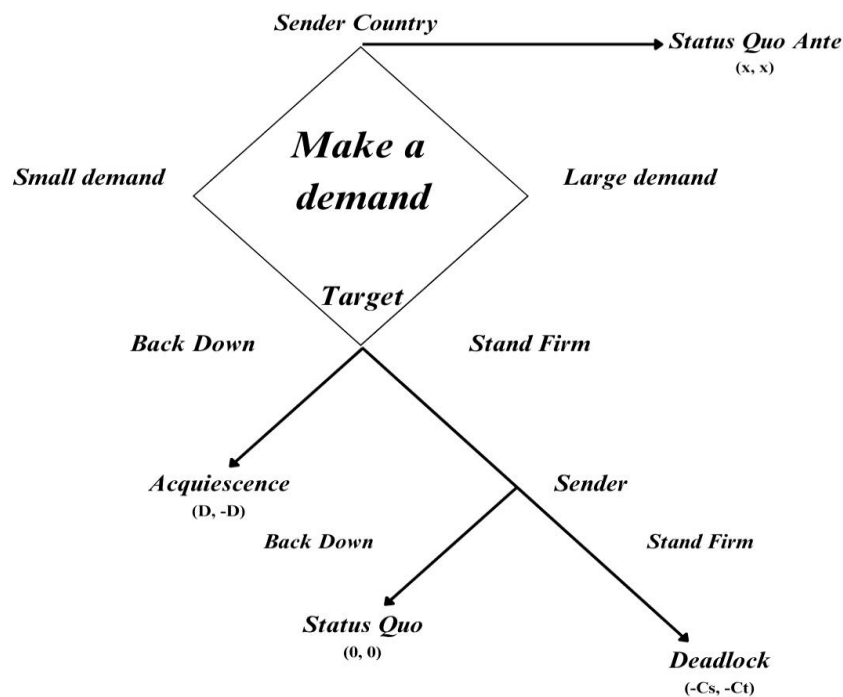
Sejalan dengan pemahaman diatas, dalam hal ini hegemoni Amerika Serikat yang berperan sebagai negara super power untuk terus menghentikan pengembangan nuklir di Iran disertai dengan adanya sanksi yang diberikan kepada Iran yang berupa embargo ekonomi, dengan membuat perjanjian JCPOA bersama negara berkekuatan besar lainnya seperti China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa yang diwakili oleh Jerman. JCPOA berperan sebagai rezim yang disepakati untuk membatasi pengembangan nuklir Iran agar dipergunakan sebagai kebutuhan sipil negara dan untuk tidak dijadikan senjata pemusnah massal, dengan imbalan diberhentikannya sanksi embargo ekonomi yang diberikan oleh DK PBB.

Namun tiga tahun setelah perjanjian ini terbentuk, Amerika Serikat memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian tersebut, yang mana sebelumnya Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang membentuk perjanjian ini. Akan tetapi, Amerika Serikat diluar perjanjian tersebut tetap dapat mengintervensi dan mengembargo perekonomian Iran

untuk menghentikan pengembangan nuklirnya diluar rezim JCPOA. Hal ini menunjukkan hegemoni Amerika Serikat sebagai negara *super power* yang memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu rezim untuk mencapai stabilitas yang lebih dominan. Diluar dari itu, Amerika Serikat juga dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghambat pengembangan nuklir di Iran.

2.2.3 Embargo sebagai *Sanction Paradox* dalam orientasi *Economic Statecraft Policy*

Embargo sebagai alat kebijakan luar negeri pada umumnya bertujuan untuk mencapai efek yang signifikan bagi negara penerima. Namun dalam beberapa kasus, embargo juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan tujuan aslinya. Beberapa negara yang dikenakan sanksi embargo bahkan dapat mengatasi dan memanfaatkan sanksi yang ditawarkan oleh negara pengirim. Hal ini sesuai dengan konsep *Sanction paradox* yang dikembangkan oleh Daniel W. Drezner yang mengkaji efektivitas dari sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri dan mempelajari ketidaksesuaian antara hasil dan ekspektasi yang dicapai dengan menerapkan adanya sanksi. Konsep ini memfokuskan kepada perilaku negara yang dikenai sanksi yang seringkali menunjukkan kemampuan untuk menemukan cara untuk mengatasi atau bahkan memanfaatkan sanksi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi yang diberikan mungkin tidak sekuat yang diharapkan oleh negara pemberi sanksi (Drezner, 1999).



Gambar 2.1 *The Coercion Game*

Adapun konsep dari *sanction paradox* ini dapat terjadi karena adanya strategi dari kedua negara yang bergantung pada *cost* dan *stalemate* (kebuntuan) dari ekspektasi negara terhadap suatu konflik, ketika negara pengirim memberikan penawaran (berupa sanksi) kepada negara target. Jika negara target memilih untuk mematuhi sanksi dari negara pengirim, maka negara tersebut akan berada di status quo, sebaliknya, jika negara target tidak mematuhi sanksi yang ditawarkan maka negara pengirim akan terus berupaya untuk memberikan penawaran kepada negara target. Penawaran ini biasanya menggunakan paksaan ekonomi, karena dapat mengurangi tekanan domestik dan mencatat ketidaksetujuan rezim pengirim sanksi terhadap tindakan negara target. Jika hal ini menyebabkan *deadlock* atau *stalemate*,

maka sanksi menjadi kurang bermanfaat dan sangat kecil kemungkinannya untuk diterapkan di negara target (Drezner, 1999).

Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi pada Amerika Serikat dan Iran, yang mana Amerika Serikat bersama DK PBB sebagai pemberi sanksi atas program nuklir Iran yang sudah diterapkan sejak tahun 2006 sebagai respon dari pengembangan uranium untuk dijadikan sebagai senjata sejak IAEA pada tahun 2003 mengumumkan bahwa nuklir Iran tidak hanya dijadikan sebagai pembangkit listrik, dan kebutuhan dalam bidang kesehatan, melainkan sangat berpotensi untuk dijadikan senjata pemusnah massal.

Sanksi dari DK PBB ini kemudian diresolusi secara berkala hingga tahun 2015, dan Iran terbukti masih belum menghentikan pengayaan uraniumnya, hal ini merupakan bentuk implementasi dari sanksi yang tidak mempengaruhi kebijakan nuklir Iran. Sejalan dengan hal tersebut, negara-negara DK PBB termasuk Amerika Serikat akhirnya sepakat untuk menciptakan JCPOA sebagai rezim untuk menekan pengembangan nuklir Iran hanya sebatas untuk kebutuhan sipil, dengan imbalan sanksi embargo ekonomi yang diberikan oleh DK PBB terhadap Iran akan diberhentikan.

Pada tahun 2018, Amerika Serikat pada era Donald Trump mulai merasa bahwa perjanjian tersebut tetap tidak efektif untuk menekan nuklir Iran, sehingga Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perjanjian tersebut dan kembali memberikan sanksi berupa embargo ekonomi melalui hegemoninya terhadap Iran.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap Iran oleh DK PBB hingga terbentuknya JCPOA tidak juga membuahkan hasil yang sesuai

ekspektasi, yang mana hal ini tidak melemahkan Iran dan masih tetap mengembangkan uraniumnya secara presisten, bahkan hingga Amerika Serikat memutuskan untuk menundurkan diri dari JCPOA, Iran sampai saat ini tetap mengembangkan nuklirnya sampai ke tahap lebih dari 60% dan dengan laporan IAEA terbaru yang menyatakan bahwa Iran yang sudah mengakumulasikan kuantitas uraniumnya sampai 5000 kg UF₆ yang menyimpulkan bahwa Iran saat ini sudah mampu menciptakan tiga senjata nuklir secara bersamaan.

2.2 Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, bukti empiris, kerangka teori dan postulat-postulat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat sebuah asumsi yang masih perlu diuji kebenarannya. Adapun rumusan asumsi adalah sebagai berikut "**Perubahan strategi kebijakan geoekonomi Amerika Serikat terhadap JCPOA terjadi karena sanksi yang dikenakan terhadap Iran sampai saat ini terbukti tidak menyebabkan Iran bersedia menghentikan program nuklirnya**".

2.3 Kerangka Analisis

